

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu upaya pemerintah dalam mendukung peningkatan Usaha Kecil Menengah (UKM) adalah diterbitkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Pemberdayaan Usaha Menengah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat serta kondisi lingkungan sosial masyarakat sekitar.

Sebuah program yang dicanangkan oleh presiden adalah program pemberdayaan UKM dimana didalam undang-undang dikatakan bahwa Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Program pemberdayaan UKM bertujuan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui dukungan pemerintah terhadap modal, peralatan serta pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dan terampil agar dapat mendukung pemasaran dan kelanjutan usaha di masa depan.

Program Pemberdayaan UKM di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat dikelola oleh SKPD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dibawah bidang Koperasi Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat. Hingga saat ini, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi

dan UKM Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat telah menyalurkan dana Pemberdayaan UKM seperti yang terlihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1. 1
Penerima Bantuan Pemberdayaan UKM Kabupaten Kapuas Hulu
2017-2018

Tahun	Nama Penerima Bantuan	Jumlah	Alamat
2017	1. UKM Maju Bersama	Rp.15.000.000	Embaloh
	2. UKM Kelompok Bina Warga	Rp.25.000.000	Putussibau Selatan
	3. UKM Dilla	Rp.50.000.000	Jongkong
	4. UKM Dian Rosita	Rp.20.000.000	Putussibau
	5. UKM Usaha Swadaya	Rp.30.000.000	Empanang
	Jumlah	Rp.135.000.000	
2018	1. UKM Riska	Rp. 50.000.000	Badau
	2. UKM INDAH	Rp. 15.000.000	Batang Lupar
	3. UKM Rita	Rp.20.000.000	Putussibau
	4. UKM Jean Pratama	Rp.15.000.000	Na. Bunut
	5. UKM DAMARA Sport	Rp.20.000.000	Putussibau
	6. UKM Sinar Lintas	Rp.20.000.000	Menengah
	Jumlah	Rp.140.000.000	

Sumber : Disperindagkopukm Kapuas Hulu, 2018

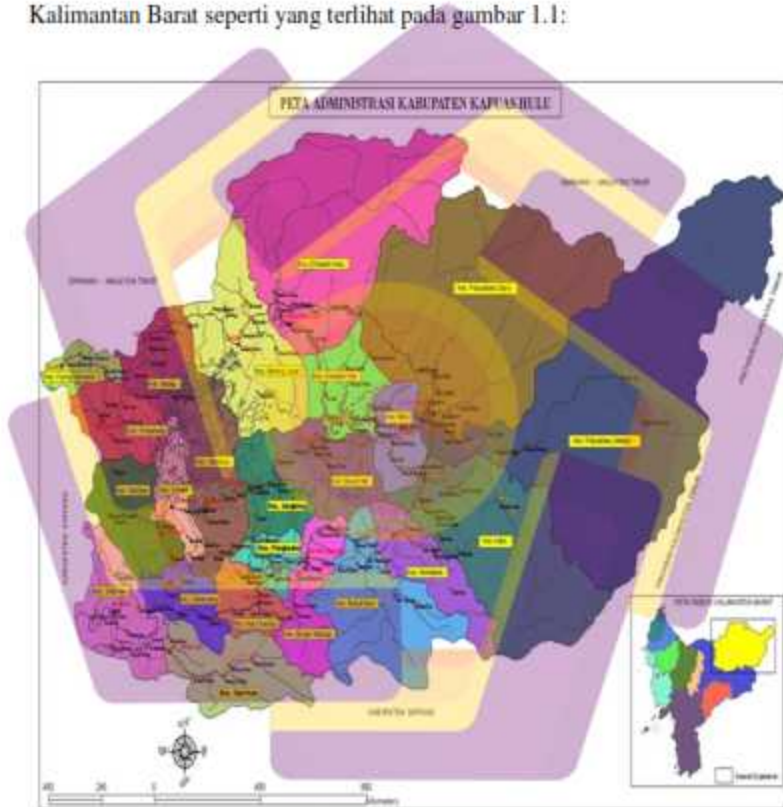
Tabel 1.1 menunjukkan kontribusi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat pada peningkatan kesejahteraan masyarakat ekonomi lemah dan peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui Program pemberdayaan UKM telah dijalankan dan menjangkau beberapa kecamatan. Dana tersebut disalurkan ke berbagai UKM yang mengajukan proposal yang akan diseleksi dan dinyatakan layak menerima bantuan pemberdayaan UKM. Kemudian kewajiban dari UKM setelah menerima dana bantuan adalah melaksanakan kegiatan pelaporan penggunaan aset dan

kelola dana sedangkan kewajiban dinas adalah melaksanakan monitoring dan pendampingan setelah dana tersebut tersalurkan hingga UKM tersebut mampu memproduksi dan memasarkan hasil usahanya.

Permasalahan yang terjadi adalah lemahnya pengawasan terhadap sistem kelola modal dan pelaporan kinerja usaha oleh UKM binaan pemberdayaan karena kondisi wilayah kapuas Hulu yang begitu luas dan moda transportasi yang kurang memadai. Sebagai gambaran Kabupaten Kapuas Hulu adalah salah satu [Daerah Tingkat II](#) di [provinsi Kalimantan Barat](#). Ibu kota kabupaten ini terletak di [Putussibau](#) yang dapat ditempuh lewat transportasi sungai Kapuas sejauh 846 km, lewat jalan darat sejauh 814 km dan lewat udara ditempuh dengan pesawat berbadan kecil dari [Pontianak](#) melalui [Bandar Udara Pangsuma](#).

Memiliki luas wilayah 29.842 km² dan berpenduduk 229.764 (Hasil Sensus Penduduk Tahun 2014), Kabupaten Kapuas Hulu dibentang oleh sungai Kapuas dimana banyak masyarakat yang bermukim di daerah Aliran Sungai dan pedalaman. Batas-batas wilayah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebelah utara berbatasan dengan Sarawak (Malaysia Timur), selatan berbatasan dengan Kabupaten Sintang, barat berbatasan dengan Kabupaten Sintang dan timur berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten Kapuas Hulu Memiliki luas wilayah 29.842 km² yang terbagi menjadi 23 kecamatan, yaitu: Badau, Batang Lupar, Pengkadan, Boyan Tanjung, Bunut Hilir, Bunut Hulu, Embaloh Hilir, Embaloh Hulu, Jongkong, Empanang, Hulu Gurung, Kalis, Putussibau Selatan, Bika, Mentebah, Puring Kencana, Putussibau Utara,

Seberuang, Selimbau, Semitau, Silat Hilir, Silat Hulu dan Suhaid. Akses jalan darat dan sungai daerah kecamatan masih tergolong minim, hanya mengandalkan sepeda motor dan motor air sedangkan untuk akses komunikasi, jaringan telepon sudah menjangkau seluruh ibukota kecamatan di kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat seperti yang terlihat pada gambar 1.1:



Gambar 1.1Peta Kabupaten Kapuas Hulu

Luas nya wilayah, banyak nya kecamatan dan pemukiman yang banyak di daerah aliran sungai dan pedalaman menjadi kendala sulitnya Dinas Perindustrian,

perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas Hulu untuk melakukan pengawasan terhadap bantuan modal usaha yang diberikan serta dari sisi UKM yang dibina juga sulit untuk memberikan pelaporan karena terkendala lokasi wilayah yang berjauhan dengan ibukota kabupaten. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk merancang sistem Informasi Monitoring UKM binaan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana merancang sistem Informasi Monitoring UKM binaan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat agar UKM binaan mampu melaporkan secara rutin dan akurat mengenai program bantuan yang diberikan serta agar instansi dapat melakukan pengawasan maksimal terhadap UKM yang diberikan bantuan ?

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis membatasi masalah hanya terkait sistem Informasi Monitoring UKM binaan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM kabupaten Kapuas Hulu provinsi Kalimantan barat. Dimana Monitoring yang dimaksud adalah Monitoring untuk pengawasan Modal bantuan, pelaksanaan hingga pelaporan dari kegiatan pemberdayaan UKM oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat. Dalam penelitian ini akan digunakan bahasa pemrograman PHP, HTML, JavaScript dan CSS. Untuk *database* menggunakan MySQL serta menggunakan Apache sebagai Web Server.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan penelitian ini adalah:

1. untuk merancang sistem InformasiMonitoring UKM binaan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat agar UKM binaan mampu melaporkan secara rutin dan akurat mengenai program bantuan yang diberikan.
2. untuk merancang sistem InformasiMonitoring UKM binaan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat agar instansi dapat melakukan pengawasan maksimal terhadap UKM yang diberikan bantuan.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, penulis melakukan persiapan dan perencanaan kegiatan dengan menggunakan beberapa metode pengumpulan data, sebagai berikut:

1. Metode Pengamatan (*Observation*)

Penulis mengamati secara langsung proses Monitoring UKM binaan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM kabupaten Kapuas hulu provinsi Kalimantan barat. Hal ini bertujuan untuk memperoleh atau mendapatkan data yang diperlukan dan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi.

2. Wawancara (*Interview*)

Secara langsung berinteraksi dan melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak yang berhubungan langsung dalam hal ini, sumber wawancara adalah Bapak Rudi Hartono, SE, M.Si sebagai Kepala Bidang Koperasi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat.

3. Studi Pustaka (*Libraryresearch*)

Penulis mengumpulkan referensi melalui buku, e-book, internet maupun jurnal yang berkaitan langsung dengan tema yang akan dibahas dalam penyusunan skripsi ini.

1.5.2 Metode Analisis

Dalam melakukan analisis, maka penulis akan memaparkan sistem yang sedang diterapkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat dalam melakukan Monitoring terhadap UKM Binaan. Adapun sistem berjalan tersebut nantinya akan disajikan ke dalam bentuk *workflow* maupun *flowchart* untuk menggambarkan sistem yang berjalan saat penelitian dilakukan.

Adapun model perancangan penulis menggunakan *tools* UML dan model pengembangan menggunakan model SDLC serta *Blackbox testing* sebagai metode pengujian.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan yang dibahas, maka dalam sistematika penulisan ini akan diuraikan

secara singkat isi dari BAB ke BAB sebanyak 5 (lima) BAB. Adapun sistematika penulisan dari masing-masing BAB adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab satu penulis menggambarkan hal-hal yang umum terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, maksud dan tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab dua ini penulis menjelaskan tentang landasan teori serta tinjauan pustaka.

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN

Pada bab tiga ini penulis akan menjelaskan gambaran secara umum mengenai objek penelitian, analisis masalah, alternatif pemecahan masalah dan rancangan.

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN

Pada bab empat ini penulis akan menjelaskan secara umum Rancangan Sistem yang akan Diusulkan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini penulis memberikan Kesimpulan dari hasil penulisan pada bab sebelumnya dan Saran atas kekurangan sistem yang ada yang nantinya dapat dipergunakan dan dimanfaatkan bagi pihak yang membutuhkan dan berkepentingan dalam penerapan sistem tersebut.